****

BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang   :   a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, perlu mengatur Perizinan Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa pengaturan perizinan penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai upaya untuk menata dan mengendalikan penyelenggaraan Reklame sesuai dengan penataan ruang Daerah sehingga menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;

c. bahwa untuk memberi kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Perizinan Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 123);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Dinas PUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong.
10. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut SATPOLPP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Moutong.
12. Orang adalah orang perseorangan atau pribadi yang melakukan usaha penyelenggaran Reklame.
13. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Tim adalah Tim Teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
18. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Videotron dan *Large Electronic Display* (LEI).
19. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
22. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner*, dan *standing banner*.
23. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan Reklame dalam undangan.
24. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
25. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*clluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
26. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame Sign Net adalah Reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
30. Reklame Insidentil adalah Reklame Baliho, Reklame Kain, Reklame Peragaan, Reklame Selebaran, Reklame Melekat, Reklame Film, Reklame Udara, dan Reklame Suara.
31. Reklame Permanen adalah Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang 8 M2 ke bawah yang diselenggarakan di persil atau Reklame Berjalan.
32. Reklame Terbatas adalah Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 M2 yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota atau Reklame Megatron dan Reklame Papan yang diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota.
33. Reklame dengan Menggunakan Konstruksi adalah penyelenggaraan Reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang Reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
34. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
35. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan Reklame.
36. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang Reklame.
37. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
38. Kawasan adalah batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
39. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame, yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik Reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik Reklame.
40. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
41. Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
42. Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
43. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun swasta.
44. Pemilik Reklame/Produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
45. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
46. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan, diselenggarakan/ dipasang dan/atau ditempelkan.
47. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan Reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa Reklame.
48. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi Reklame untuk menyelenggarakan Reklame.
49. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame, yang selanjutnya disingkat GRTBB adalah gambar rencana Reklame Megatron, Bando Jalan, Videotron, *Large Electronic Display* (LEI) dan papan/billboard termasuk Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
50. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.
51. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan Reklame.
52. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
53. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
54. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
55. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
56. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi Reklame Insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
57. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
58. Biaya Uang Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame.
59. Konsesi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola.
60. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
61. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

**BAB II**

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 2**

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
2. Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai permohonan jenis Izin Penyelenggaraan Reklame yang diperlukan Pemohon yang dimohonkan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
3. Persyaratan dan jenis Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
4. Izin untuk Reklame Permanen :
5. blanko/formulir permohonan yang sudah diisi;
6. fotokopi KTP yang masih berlaku;
7. fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
8. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM (bagi yang berbentuk Perseroan Terbatas/PT);
9. foto/display titik lokasi;
10. Izin Mendirikan Bangunan;
11. NPWP;
12. surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban di atas materi 6000;
13. surat pernyataan kesanggupan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas materi 6000;
14. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
15. surat kuasa dari Pemohon di atas materai 6000 kepada penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan.
16. Izin untuk Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil :
17. blanko/formulir permohonan yang sudah diisi;
18. fotokopi KTP yang masih berlaku;
19. fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
20. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM (bagi yang berbentuk Perseroan Terbatas/PT);
21. foto/display titik lokasi;
22. NPWP;
23. surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban di atas materi 6000;
24. surat pernyataan kesanggupan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas materi 6000;
25. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
26. surat kuasa dari Pemohon di atas materai 6000 kepada penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan.
27. Bupati membentuk Tim Teknis untuk meneliti berkas permohonan Pemohon dan melakukan penelitian lapangan untuk validasi.
28. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
29. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
30. Kepala DPMPTSP sebagai Sekretaris;
31. Kepala Dinas PUPRP sebagai Anggota;
32. Kepala Dinas Perhubungan sebagai Anggota;
33. Kepala BAPENDA sebagai Anggota; dan
34. Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan sebagai Anggota.
35. Hasil penelitian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian sebagai pertimbangan pemberian Izin.

**Pasal 3**

1. Apabila setelah dilakukan penelitian oleh Tim Teknis, permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bupati paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima menyatakan penolakannya.
2. Apabila berdasarkan penelitian dan pengkajian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai jenis Reklame yang dimohonkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera diberitahukan kepada Pemohon setelah ditetapkan.
4. Kepala DPMPTSP wajib melaporkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkannya kepada Bupati sebulan sekali.

**BAB III**

**MASA BERLAKU IZIN REKLAME**

**Pasal 4**

Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin untuk Reklame Permanen berlaku selama 1 (satu) tahun; dan
2. Izin untuk Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

**BAB IV**

**LARANGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 5**

Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan Reklame :

1. menempatkan/membangun Reklame Permanen yang menyatu dengan papan nama di kantor/instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan sekolah;
2. menempatkan Reklame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang dari 25 (dua puluh lima) meter yang dihitung dari pagar terluar bangunan;
3. menempatkan Reklame di sekitar tempat pendidikan dan tempat ibadah yang menyatu dengan papan nama tempat usaha/toko;
4. memasang Reklame Permanen di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali untuk pemasangan media informasi milik Pemerintah Daerah;
5. menempatkan/menggunakan lokasi/tempat penyangga Reklame di dua sisi pembatas pada jembatan;
6. membangun konstruksi bangunan Reklame dan media informasi berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor; dan
7. menempatkan Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil di tepi jalan.

**BAB IV**

**PEMBONGKARAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembongkaran Reklame**

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran Reklame, apabila :

1. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. melanggar ketentuan dari pemberian Izin;
3. menyelenggarakan Reklame tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
4. telah habis masa berlaku Izin; atau
5. tidak melakukan kewajiban berupa membayar pajak dan/atau kewajiban lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pembongkaran**

**Paragraf 1**

**Pembongkaran Reklame Permanen**

**Pasal 7**

Pembongkaran untuk Reklame Permanen, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. SATPOLPP melakukan pengecekan lokasi penyelenggaraan Reklame :
2. yang telah habis masa berlaku Izinnya;
3. yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
4. tanpa Izin; atau
5. tidak melakukan kewajiban berupa membayar pajak dan/atau kewajiban lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. apabila ditemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, SATPOLPP mengirimkan surat peringatan kepada Penyelenggara Reklame untuk membongkar sendiri Reklamenya;
7. setelah diberi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam waktu 3 (tiga) hari Penyelenggara Reklame tidak membongkar sendiri Reklamenya, SATPOLPP akan menerbitkan surat peringatan untuk pembongkaran;
8. surat peringatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan klasifikasi waktu :
9. surat peringatan pertama paling lama 7 (tujuh) hari,
10. surat peringatan kedua paling lama 5 (lima) hari setelah surat peringatan pertama; dan
11. surat peringatan ketiga paling lama 3 (tiga) hari setelah surat peringatan kedua.
12. apabila setelah diterbitkan surat peringatan ketiga, Penyelenggara Reklame belum membongkar sendiri Reklamenya, pada hari keempat setelah penerbitan surat peringatan pembongkaran, SATPOLPP melakukan pembongkaran; dan
13. dalam melakukan pembongkaran, SATPOLPP dapat meminta bantuan pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan.

**Pasal 8**

Pembongkaran untuk Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil dapat dilakukan langsung oleh SATPOLPP setelah habis masa berlaku Izin dan masa pajaknya berakhir dengan ketentuan apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar sendiri Reklamenya.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

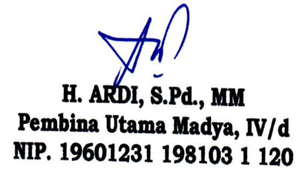
pada tanggal

Diundangkan di Parigi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR